



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI
KE PROVINSI SUMATERA BARAT
PADA MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2022 – 2023
16 – 20 DESEMBER 2022**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

2022

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Pasal 67 dan 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, diatur bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi, yakni Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut, dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan kunjungan kerja, baik di dalam maupun ke luar negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UU MD3.

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Ke Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada aturan pada Undang-Undang tersebut. Selain itu, pelaksanaan kunjungan ini juga didasarkan pada Keputusan Pimpinan DPR RI tentang Penugasan Anggota Komisi I s.d. XI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja pada Masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2022 – 2023, dan Keputusan Rapat Intern Komisi VI DPR RI mengenai Sasaran dan Objek Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI dalam Masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2022 – 2023.

B. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI

NO.	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1.	A-189	ARIA BIMA	PIMP. / F-PDIP
2.	A-33	FAISOL RIZA, S.S.	KETUA / F-PKB
3.	A-103	MOHAMAD HEKAL, M.B.A.	WAKIL KETUA / F-PGERINDRA
4.	A-196	ADISATRYA SURYO SULISTO	F.PDIP
5.	A-161	Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.	F.PDIP
6.	A-170	RIEKE DIAH PITALOKA	F.PDIP
7.	A-181	Dr. EVITA NURSANTY, M. Sc.	F.PDIP
8.	A-208	dr. H. MUFTI A.N ANAM	F.PDIP
9.	A-302	NUSRON WAHID	F.PG
10.	A-65	ANDRE ROSIADE	F.GERINDRA
11.	A-94	MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B.Bus., M.M., M.B.A.	F.PGERINDRA
12.	A-16	Drs. H. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si.	F.PKB
13.	A-361	ZURISTYO FIRMA DATA., S.E., M.M.	F NASDEM
14.	A-374	H. SUBARDI, S.H., M.H	F NASDEM
15.	A-536	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI	F.PD
16.	A-554	Dr. EDHIE BASKORO YUDHOYONO, B.Comm., M.Sc.	F.PD
17.	A-416	Hj. NEVI ZUAIRINA	F.PKS

18.	A-493	EKO HENDRO PURNOMO, S. Sos.	F.PAN
19.	A-499	Hj. INTAN FAUZI, S.H., LL.M.	F.PAN
20.	A-463	ELLY RACHMAT YASIN	F.PPP

C. Objek Kunjungan Kerja

Terkait dengan Objek Kunjungan Kerja Reses ini, beberapa pihak yang akan terlibat antara lain :

1. Kementerian Koperasi dan UKM RI
2. Kementerian BUMN
3. PT Semen Indonesia
4. PT Semen Padang
5. PT Pertamina (Persero)
6. PT Patra Niaga
7. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
8. PT Pupuk Indonesia (Persero)

D. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja

Secara umum kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan yang berhubungan dengan perkembangan kinerja Pemerintah Daerah, kinerja beberapa BUMN serta perkembangan sektor industri tertentu termasuk permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta upaya penyelesaiannya.

Secara khusus kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kondisi pengembangan infrastruktur dan peningkatan layanan jasa dan barang serta Pabrik Indarung I yang ditetapkan sebagai cagar budaya di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan untuk mendapatkan informasi terkait penyaluran elpiji 3 kg, ketersediaan Bahan Bakar Minyak, Listrik di desa dan subsidi pupuk kepada petani dan masyarakat di Sumatera Barat

II. INFORMASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA

1. Paparan Mitra Kerja

a. Kementerian Koperasi dan UKM RI



Capaian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM khususnya di Provinsi Sumatera Barat selama masa pandemi masih selaras dengan rencana program dan kegiatan yg telah disusun, hal ini ditandai diantaranya dengan capaian realisasi pagu Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp16.097.432.770.439 (Termasuk BPUM) atau sebesar **96,19%** dan estimasi realisasi pagu Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2022 sebesar **94 %**, selain itu capaian yg telah dilakukan pada tahun 2022 ini diantaranya melalui alokasi anggaran dekon sebesar **Rp12,8 miliar** diantaranya utk pendataan sebesar **Rp9,6 miliar** dan pendampingan PPKL sebesar **Rp1,1 miliar**, pada tahun 2022 juga dialokasikan anggaran pelatihan dan pendampingan melalui DAK NF sebesar **Rp10,5 miliar**.

RINCIAN DATA INDIKATOR KINERJA DAN TARGET URUSAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2021 S.D. 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja dan Target				Indikator Kinerja dan Target 2023			
		2021		2022		Nasional		Daerah	
		Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Provinsi	Target
1.	Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Pertumbuhan volume usaha koperasi	14%	Pertumbuhan volume usaha koperasi	14%	Pertumbuhan volume usaha koperasi	18%	34 Provinsi/DI	18%
2.	Mewujudkan UMKM dan Wirausaha Naik Kelas yang Mampu Berdaya Saing di Pasar Domestik dan Global	Meningkatnya Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	4%	Meningkatnya Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	4%	Meningkatnya Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	4%		4%
		Terfasilitasinya UMKM yang Berpotensi Masuk ke dalam Rantai Pasok dan Ekspor	60%	Terfasilitasinya UMKM yang Berpotensi Masuk ke dalam Rantai Pasok dan Ekspor	65%	Terfasilitasinya UMKM yang Berpotensi Masuk ke dalam Rantai Pasok dan Ekspor	70%		2 UMKM
		Pertumbuhan Wirausaha	2,5%	Pertumbuhan Wirausaha	3,0%	Pertumbuhan Wirausaha	3,5%		3,5%

Sumber : Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 2020 - 2024

Memasuki tahun ketiga pandemi covid-19 ini, perekonomian indonesia secara perlahan kembali bangkit, hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan III 2022 tumbuh sebesar 5,72% sedangkan pertumbuhan ekonomi sumbar tumbuh sebesar 4,54%. Begitupun para pelaku UMKM yang telah mampu bertahan dan bertransformasi ke ekonomi digital.

ARAH KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KUMKM 2020-2024

Arah Kebijakan Pemberdayaan dan Pengembangan KUMKM 2020-2024

Mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong Melalui Peran Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Dalam Mendukung Perekonomian Nasional

Mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden Poin ke-II

Membentuk Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Melalui Peran Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Dalam Mendukung Perekonomian Nasional

"Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 Mencakup Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi", yaitu:

Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar;

Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;

Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;

Meningkatkan penciptaan peluang start-up; serta

Meningkatkan nilai tambah usaha sosial.

Pendekatan Strategi Transformasi Koperasi, UMKM, dan Wirausaha

1. TRANSFORMASI USAHA INFORMAL KE FORMAL
2. TRANSFORMASI DIGITAL DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
3. TRANSFORMASI KE DALAM RANTAI PASOK
4. TRANSFORMASI PERTUMBUHAN WIRUSAHA PRODUKTIF
5. MODERNISASI KOPERASI

Pendekatan Klasifikasi Program/Kegiatan Strategis

1. AKSES PEMBIAYAAN

2. PENINGKATAN KAPASITAS SDM

3. PERLUASAN PASAR DAN DIGITAL

4. KEMITRAAN STRATEGIS

5. PENDATAAN LENGKAP (SIDT-KUMKM)

6. REFORMASI BIROKRASI

Adapun permasalahan dan tantangan yang saat ini ada diantaranya adalah pendanaan dan akses informasi bagi UMKM, walaupun sudah banyak akses pendanaan bagi UMKM diantaranya melalui KUR, ULam dan

kredit ultra mikro, namun hal UMKM masih kesulitan untuk mengakses informasi. Oleh karena itu sebagai antisipasi atas hal tersebut Kementerian Koperasi dan UKM berusaha untuk menyalurkan pendanaan diantaranya melalui **KUR KLASTER** kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau modal kerja dan/atau investasi kepada debitur kelompok usaha yang produktif dan layak, namun **belum memiliki cukup agunan tambahan**, diberikan kepada **kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha**. Penyelenggaraan KUR Klaster ini Dalam rangka mendorong perluasan penyaluran **KUR klaster berbasis komoditi unggulan yang bertujuan** untuk memperluas dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, rantai pasok dan pemberdayaan ekonomi lokal, sehingga diperlukan sinergi dan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dan *stakeholder* lainnya. Hal ini juga dilakukan untuk mempermudah bagi para pelaku UMKM dalam mengakses pendanaan serta Target Digitalisasi Koperasi dan UMKM dimana target nasional adalah sebesar **20 Juta** pada tahun 2022 hingga saat ini sudah sebesar **20,2 Juta**.



RENCANA PROGRAM/KEGIATAN
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KUMKM TAHUN 2023

Deputi Bid. Perkoperasian
150 Koperasi Modern

- 1) Koperasi modern melalui penguatan korporatisasi pangan;
- 2) Perkuatan pengawasan koperasi;
- 3) Peningkatan kapasitas sdm dan pendampingan bagi pelaku koperasi;
- 4) Fasilitasi pembiayaan alternatif bagi koperasi dalam meningkatkan peran aktif anggotanya.

Deputi Bid. Usaha Mikro
Transformasi Usaha Informal ke Formal 4%

- 1) Fasilitasi pembiayaan bagi UMI melalui KUR dan pembiayaan lainnya;
- 2) Fasilitasi bagi usaha mikro dalam pemanfaatan infrastruktur publik;
- 3) Fasilitasi pendampingan usaha mikro dalam mengakses perizinan usaha;
- 4) Fasilitasi pengembangan sarana, prasarana dan promosi bagi usaha mikro melalui akses pasar dan *major project* UMKM terpadu;
- 5) Pendampingan serta penguatan pengembangan usaha mikro melalui pelatihan dan sosialisasi;
- 6) Layanan bantuan hukum bagi usaha mikro.

Deputi Bid. UKM
Kontribusi Ekspor UKM Minimal 16,4%

- 1) Fasilitasi pembiayaan bagi UKM melalui pembiayaan non-bank untuk mendukung ekspor;
- 2) Pendampingan bagi pelaku UKM melalui penguatan kompetensi dan pelatihan untuk mengakses ekspor;
- 3) Pengembangan sentra UKM melalui factory sharing dan standarisasi mutu;
- 4) Fasilitasi sarana promosi dan kemitraan bagi UKM melalui pameran dan digitalisasi.

Deputi Bid. Kewirausahaan
Rasio Kewirausahaan 3,5% menjadi 3,18% (usulan baru)

- 1) Implementasi pelaksanaan perpres Kewirausahaan Nasional;
- 2) Optimalisasi pendampingan melalui PLUT-KUMKM;
- 3) Pengembangan pendataan Koperasi dan UMKM;
- 4) Penguatan dan pendampingan bagi wirausaha;
- 5) Penguatan inkubasi dan digitalisasi;
- 6) Perluasan alternatif pembiayaan dan permodalan bagi wirausaha.

LPDB - KUMKM

Penyaluran Dana Bergulir bagi Koperasi diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi Koperasi dan UKM, khususnya yang bergerak pada sektor riil seperti pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, berbasis ekspor atau substitusi impor dan lain sebagainya.

LLP - KUMKM

- 1) Peningkatan Kapasitas UKM dalam Layanan Pemasaran Domestik dan Global;
- 2) Pengembangan SMESCO HUB untuk Indonesia Bagian Timur;
- 3) Pengembangan Pelatihan dan Pendampingan UKM serta Pengembangan Program Sparc.

http://www.kemenkopukm.go.id

Program/Kegiatan Prioritas Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas UMKM diantaranya melalui proses pendataan, pendampingan kepada UMKM diantaranya melalui DAK Non Fisik di Provinsi Sumatera Barat dimana pada Tahun 2022 dialokasikan sebesar **Rp10,5 miliar** dgn target pelatihan sebesar **2.581** dan pendampingan sebanyak **49 pendamping** lalu pada tahun 2023 alokasi DAK Non Fisik Prov. Sumatera Barat sebesar **Rp11 miliar** dengan target pelatihan sebesar **2.453** dan pendampingan sebanyak **68 Pendamping**, selain itu juga pada tahun 2023 direncanakan **akan dibangun PLUT pada Kab. Pesisir Selatan** dengan alokasi anggaran sebesar **Rp8.148.834.000** hal ini dilakukan untuk mendorong para UMKM untuk berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi serta pariwisata di Provinsi Sumatera Barat.

KOLABORASI IMPLEMENTASI KEGIATAN PRIORITAS
MANDAT PP 7 TAHUN 2021

REGULASI

Kebijakan Implementasi Alokasi 40 persen Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi UMKM.
On Boarding produk UKM

30 persen Infrastruktur Publik Untuk Tempat Pengembangan Usaha Dan Tempat Promosi UMKM. Pembinaan Usaha Mikro dan Kemitraan Usaha

Penyelenggaraan Basis Data Tunggal. **Sistem Informasi Data Tunggal Terintegrasi dan Infrastruktur Data Tunggal UMKM**

Pengembangan Wirusaha Muda Produktif. **Inkubator Usaha**

Kemitraan Strategis UMKM Masuk Dalam Rantai Pasok Berbasis Koperasi Modern. **Koperasi Modern dan Pengembangan koperasi berbasis usaha mikro**

Penyediaan Pusat Kuliner dan Oleh-Oleh Di Kawasan Wisata. **Penyediaan Pusat Promosi Kuliner dan Oleh-Oleh**

TEKNIS

Penanggung Biaya Pembinaan dan Pendampingan Usaha Mikro Dalam Perizinan Usaha Dan Bantuan Hukum. **Pendaftaran NIB dan Pendampingan Konsultasi dan Bantuan Hukum**

Penyediaan Sistem Informasi UKM Ekspor Atau Katalog Promosi Digital. **Katalog promosi digital UKM Ekspor**

Penyediaan Rumah Produksi Bersama dengan Model Bisnis Dan Tata Kelola Koperasi. **Major Project Rumah Produksi Bersama (Factory Sharing) dan Pengembangan model dan penerapan kerja sama koperasi**

Optimalisasi PLUT-KUMKM Sebagai Pusat Promosi Dan Kreatif Hub. **Pusat Promosi dan Kreatif Hub**

Peningkatan Dan Perluasan Akses Pembiayaan Bagi Koperasi Dan UMKM. **BPUM, KUR, dan Penyaluran Dana Bergulir bagi Koperasi dan UKM Strategis**

http://www.kemenkopukm.go.id

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PLUT SEBAGAI DUKUNGAN DAERAH PRIORITAS PARIWISATA

Optimalisasi PLUT dalam Memperkuat Kapasitas Pendamping, Konsultan, dan Penyuluh KUMKM

1

Penguatan kapasitas SDM konsultan bisnis dan pendamping UMKM untuk meningkatkan keterjangkauan dan ekspansi layanan PLUT, khususnya mendukung pelayanan optimal bagi UMKM di daerah destinasi wisata.

2

Transfer knowledge dan menjalin kemitraan dengan lembaga inkubator dalam upaya meningkatkan kemampuan SDM pendamping UMKM untuk pengembangan usaha UMKM yang didampinginya

3

Kerjasama lintas pemangku kepentingan, terutama dunia usaha, sebagai upaya menjangkau potensi pasar bagi UMKM yang dibina oleh para pendamping dan/atau konsultan bisnis PLUT.



KEGIATAN PRIORITAS DIGITALISASI KUMKM 2022-2024



Perkembangan Ekonomi

"Nilai tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi digital tertinggi di Asia Tenggara, baik pada tahun 2021 maupun tahun 2025. Saat ini 41,9% dari total transaksi ekonomi digital ASEAN berasal dari Indonesia"

Perkembangan Ekonomi

"Untuk percepatan digitalisasi koperasi dan UMKM dengan Fokus Platform per Skala Usaha tersebut, telah disusun Roadmap Digitalisasi Koperasi dan UMKM, dengan target Koperasi Modern dan pelaku UMKM onboarding digital sebesar 100 koperasi serta 13,5 juta UMKM di tahun 2021, meningkat menjadi 200 koperasi serta 19 juta UMKM pada 2022, selanjutnya menjadi 350 koperasi serta 24,5 juta UMKM pada 2023, dan sebanyak 500 koperasi serta 30 juta UMKM pada 2024."

Roadmap Digitalisasi Koperasi dan UMKM

UMKM ONBOARD DIGITAL	KOPERASI DIGITAL
CAPAIAN 2021 16,4 JT	CAPAIAN 2021 202 KOPERASI
TARGET 2021 13,7 JT	TARGET 2021 100 KOPERASI
TARGET 2022 19 JT	TARGET 2022 200 KOPERASI
TARGET 2023 24,5 JT	TARGET 2023 350 KOPERASI
TARGET 2024 30 JT	TARGET 2024 500 KOPERASI



KEGIATAN PRIORITAS MAJOR PROJECT PENGELOLAAN TERPADU KUMKM 2022-2024



IMPACT/ OUTCOME

- Mendukung Kontribusi Koperasi terhadap PDB sebesar 5,3%;
- Mendukung Kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 63%;
- Mendukung Pertumbuhan Wirausaha meningkat menjadi 3,0%;
- Mendukung Proporsi UMKM yang mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal meningkat menjadi 27,8%;
- Tingkat Implementasi Kemitraan Strategis UKM sebesar 65%.

OUTPUT MP

- Produksi Nilam Meningkatkan Menjadi 379 Ton;
- Penggunaan Bahan Baku Rotan Meningkatkan Menjadi 12.000 Ton;
- Produksi Biofarmaka (Jahe) Meningkatkan Menjadi 3.410,9 Ton;
- Produksi Daging Sapi Meningkatkan Menjadi 3701,3 Ton;
- Produksi Kelapa Meningkatkan Menjadi 264,4 Ton.

Mengamankan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang dilakukan melalui:

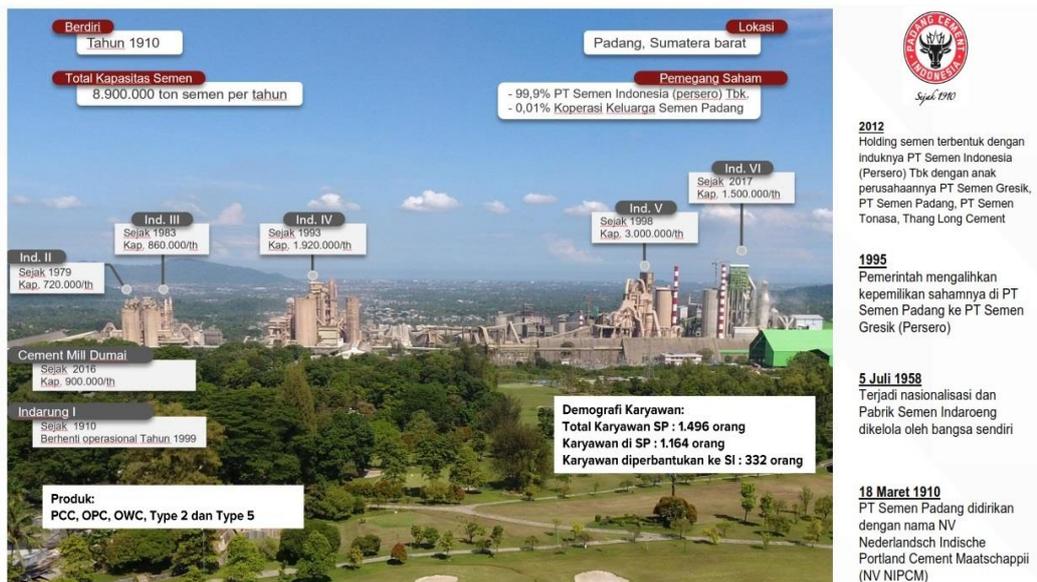
Pendirian/Legalitas	Pembiayaan	Penyediaan Bahan Baku	Proses Produksi	Kurasi	Pemasaran Produk
<ol style="list-style-type: none"> Pendaftaran perizinan berusaha Facilitasi standarisasi dan sertifikasi ekspor Facilitasi kepemilikan hak kekayaan intelektual 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan akses pembiayaan Imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga Penjaminan kredit modal kerja Penyaluran dana bergulir Bantuan permodalan Bentuk pembiayaan lain 	<ol style="list-style-type: none"> Membuka akses penyediaan bahan baku/penolong Memastikan ketersediaan bahan baku/penolong 	<ol style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana Peningkatan kompetensi SDM Facilitasi standarisasi dan sertifikasi produk untuk ekspor melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan berdasarkan klaster Facilitasi desain produk dan kemasan, citra produk, desain/konten toko online Pembiinan dalam proses fabrikasi produk 	<ol style="list-style-type: none"> Penilaian produk unggulan daerah yang memiliki potensi pasar Seleksi dan penilaian terhadap usaha mikro dan kecil 	<ol style="list-style-type: none"> Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Facilitasi pameran dalam negeri dan luar negeri Pengembangan kapasitas logistik Literasi digital dan non digital Pengembangan aggregator bisnis online

b. PT Semen Indonesia dan PT Semen Padang



Menjadi pabrik semen pertama di Indonesia bahkan di Asia Tenggara, tentunya membuat PT Semen Padang memiliki sejarah panjang dalam perindustrian semen di dunia. Banyaknya bangunan monumen, atau mahakarya yang telah dibangun menggunakan produk PT Semen Padang menjadikan semen asal Sumatera Barat tersebut memiliki nilai historis yang tinggi, seiring perkembangan dan pertumbuhan daerah di Indonesia.

SIG Profil PT Semen Padang



Demi menjaga dan melestarikan sejarah untuk generasi penerus yang ada di Sumatera Barat, baru-baru ini Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) telah menetapkan Kawasan Cagar Budaya Indarung I menjadi Cagar Budaya Peringkat Provinsi, yang di dalamnya terdapat situs bersejarah, yaitu Pabrik Indarung I dan PLTA Rasak Bungo. Penetapan pabrik semen yang telah berusia 112 tahun itu dilakukan, setelah sebelumnya Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Walikota Padang, Hendri Septa, menetapkan Kawasan Pabrik Indarung I sebagai Cagar Budaya Kota.



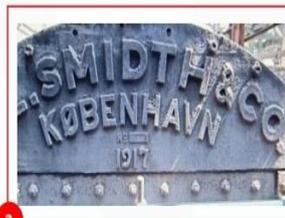
HISTORY INDARUNG 1

Kiln Indarung I Beroperasi tahun 1911 s.d 1999



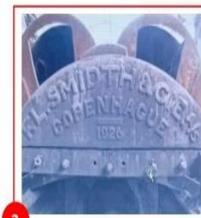
1

Kiln 1
Tahun Beroperasi 1911
Kapasitas 76,5 ton/hari



2

Kiln 2
Tahun Beroperasi 1917
Kapasitas 76,5 ton/hari



3

Kiln 3
Tahun Beroperasi 1926
Kapasitas 210 ton/hari



4

Kiln 4
Tahun Beroperasi 1935
Kapasitas 270 ton/hari



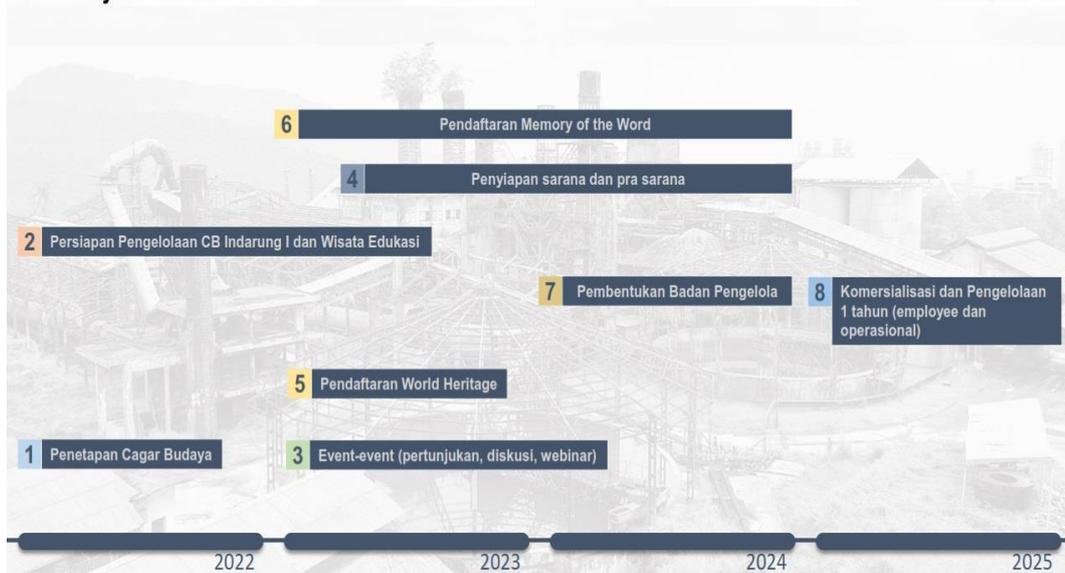
5

Kiln 5
Tahun Beroperasi 1971
Kapasitas 822 ton/hari

Pada tahun 1999 semua Kiln Indarung 1 berhenti beroperasi karena emisi dari proses basah mencemari lingkungan (melewati batas ambang emisi) dan tidak efisien.

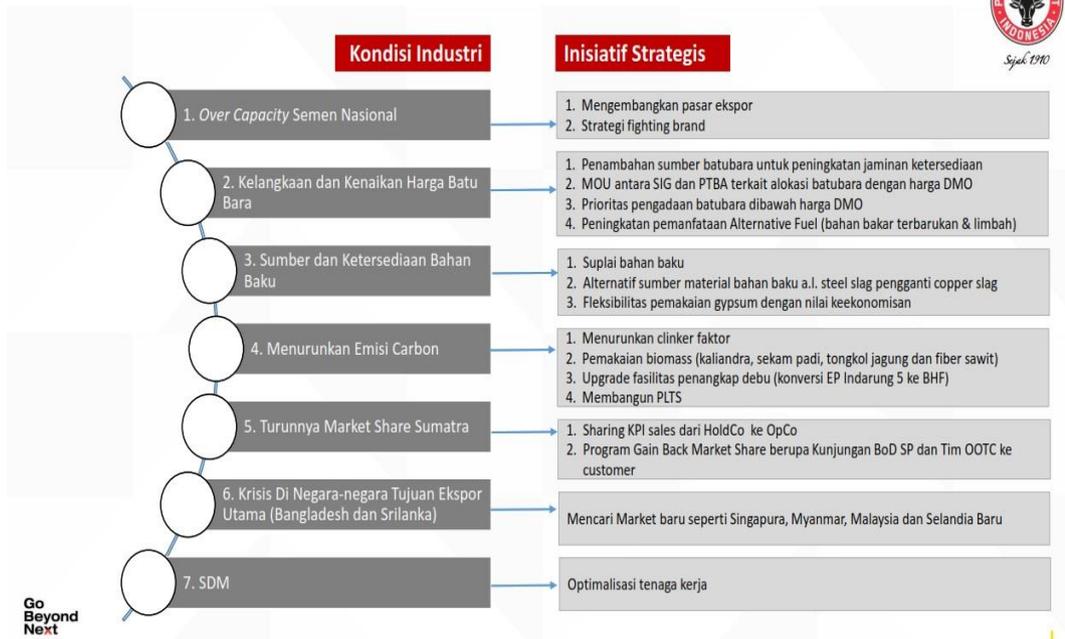
Go Beyond Next

Road Map Indarung 1 Menjadi Cagar Budaya dan Tujuan Wisata Edukasi



Selain usianya sudah lebih dari satu abad, kedua bangunan tua di kawasan PT Semen Padang ini punya nilai sejarah yang luar biasa, termasuk teknologinya juga luar biasa pada masanya. Bahkan, semen yang diproduksi Pabrik Indarung I tidak hanya digunakan di Indonesia, tapi juga oleh negara-negara lain.

Kondisi Industri dan Inisiatif Strategis



Dalam (Miliar Rupiah)

Pilar	RKAP 2022	Real 2022 (s/d Nov)	Prog 2022
1	2	3	4
SOSIAL	7,3	8,9	9,3
EKONOMI	5,7	6,1	6,5
LINGKUNGAN	6,0	6,6	6,7
HUTA	0,5	0,7	0,6
TOTAL	19,5	22,4	23,2

Go Beyond Next

PILAR SOSIAL

- Penguatan Guru MDA dan Khatib (*Rutin*)
- Beasiswa Prestatif Anak Negeri (*Rutin*)
- Pembinaan Yayasan Igaras Semen Padang (*Rutin*)
- Pembinaan SD Bustanul Ulum (*Rutin*)
- Pelatihan Tukang dengan menggunakan Bata Interlock
- Penyediaan sarana dan prasarana Sekolah
- Program Stunting
- Donor Darah (*Rutin*)
- Penguatan Panti Asuhan (*Rutin*)
- Sapi Qurban (*Rutin*)
- Bantuan Mesjid Jabal Rahmah (*Rutin*)

PILAR LINGKUNGAN

- Program Pemakaian Kallandra (*Unggulan & CSV*)
- Program Budidaya Kopi Bancha (*Unggulan & CSV*)
- Program Konservasi Ikan Bilih (*Unggulan*)
- Penanaman Mangrove
- Program Kampung Iklim
- Pembangunan Mesjid/Mushala

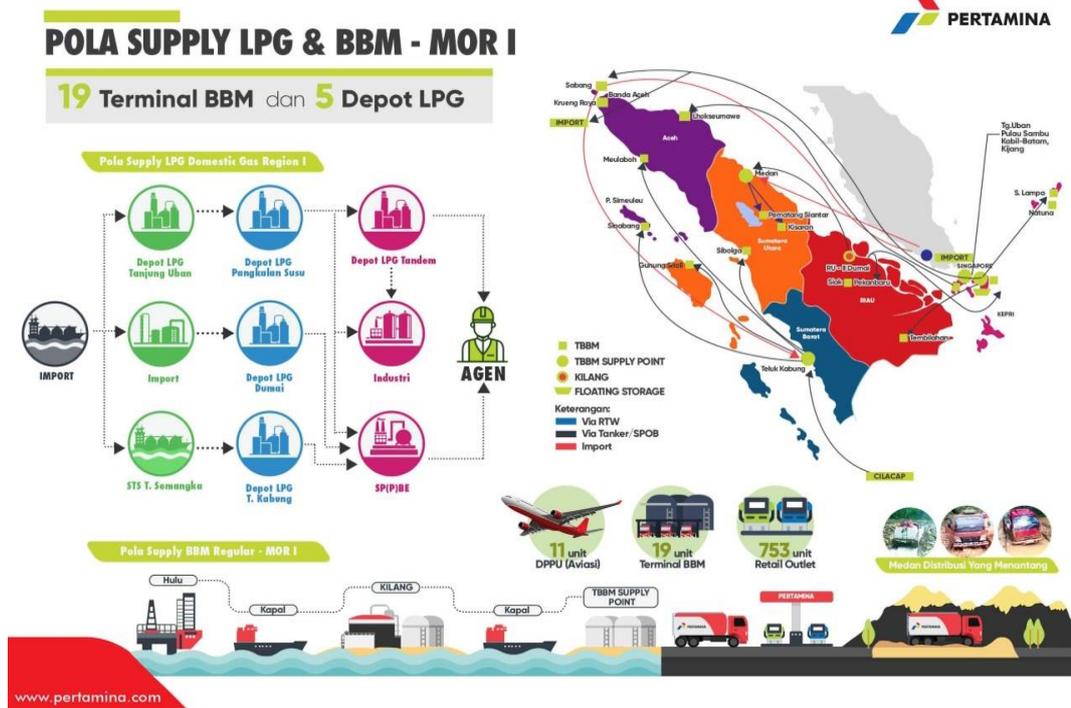
PILAR EKONOMI

- Pemberdayaan Forum Nagari (*Rutin*)
- Pembangunan jalan dan jembatan
- Pembinaan Masyarakat Adat (*Rutin*)

PILAR HUKUM & TAKEL

- Monitoring Program PUMK (*Rutin*)
- Survey & pelaksanaan Program TJSL (*Rutin*)

c. PT Pertamina (Persero) dan PT Patra Niaga

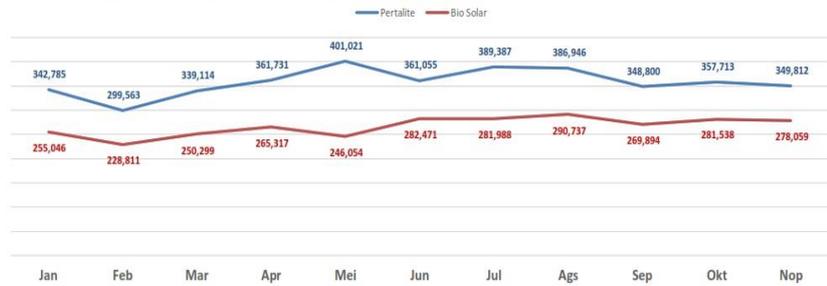


Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan II 2022 tumbuh positif melanjutkan tren perbaikan ekonomi. Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan II 2022 tercatat sebesar 5,08% (yoy) meningkat dibandingkan dengan triwulan I 2022 yang tumbuh 3,64% (yoy). Akselerasi kinerja ini didorong oleh permintaan domestik yang terus meningkat terutama oleh konsumsi Rumah

Tangga (RT). Perbaikan ekonomi Sumatera Barat juga tercermin pada peningkatan mayoritas lapangan usaha. (Sumber : www.bi.go.id)



Realisasi JBKP-JBT Ytd Nov 2022



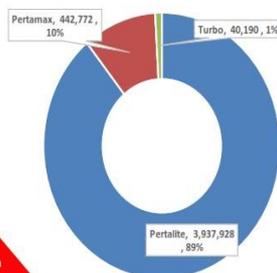
Rerata Penyaluran Harian Jan-Nov

Peralite : 11.790 KL/day
Bio Solar : 10.733 KL/day

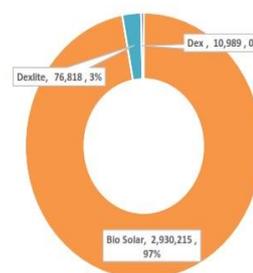
Rerata Penyaluran Harian November

Peralite : 11.479 KL/day
Bio Solar : 9.148 KL/day

Komposisi Gasoline Sumbagut 2022



Komposisi Gasoil Sumbagut 2022



Proporsi LPG Sumbagut



Produk	SAM	Realisasi 2021	Target 2022	Real Ytd Nov 2022	Real vs Target	Sisa Target	Prognosa 2022	Prognosa vs Target
LPG 3 KG	SAM Aceh	100,748	104,670	99,201	95%	5,469	108,683	104%
	SAM Medan	338,822	353,566	323,105	91%	30,461	353,990	100%
	SAM Sibolga	92,562	96,610	91,830	95%	4,780	100,608	104%
	SAM Sumatera Barat	120,729	131,407	120,057	91%	11,350	132,968	101%
	SAM Riau	166,543	173,383	165,553	95%	7,830	181,378	105%
	SAM Kepulauan Riau	55,623	58,031	53,901	93%	4,130	59,053	102%
	SR SUMBAGUT	875,026	917,667	853,647	93%	64,020	923,321	103%



Realisasi pendapatan Provinsi Sumatera Barat hingga triwulan II 2022 tercatat mengalami penurunan dibandingkan triwulan II 2021. Realisasi pendapatan daerah pada triwulan II 2022 tercatat senilai Rp2,92 Triliun, atau mencapai 49,10% dari target, menurun secara persentase dibandingkan realisasi hingga triwulan II di tahun 2021 yang senilai Rp3,44

Triliun atau sebesar 52,95%. Kinerja pendapatan daerah didorong oleh pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pos Lain-lain Pendapatan yang Sah.



LAYANAN KHUSUS BBM & SPBU

288 SPBU SIAGA

Jalur Wisata dan Jalur Utama Mudik



22 SPBU MOTORIS

SPBU dengan jalur kepadatan tinggi dan area yang tidak terjangkau SPBU Reguler



74 SPBU dengan CCTV ONLINE

Dari 93 Kota/Kab, telah siap sinkronisasi CCTV di 74 SPBU untuk monitoring situasi lalu lintas di SPBU Jalur Wisata dan Jalur Utama Mudik. Tahap sinkronisasi sudah **89%**



35 KANTONG BBM

Antisipasi Pasokan SPBU apabila terjadi kenaikan permintaan BBM utamanya Jalur Wisata dan Jalur Utama Mudik



www.pertamina.com

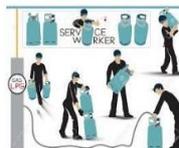


LAYANAN KHUSUS LPG



669 Agen LPG PSO SIAGA

Memastikan pemenuhan kebutuhan LPG PSO pada Hari Raya dan Libur



154 Agen LPG NPSO SIAGA

Memastikan pemenuhan kebutuhan LPG NPSO di Hari Raya dan Libur



36.341 Pangkalan LPG PSO SIAGA

Memudahkan Konsumen membeli LPG PSO



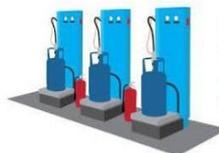
5.483 Pangkalan LPG NPSO SIAGA

Memudahkan Konsumen membeli LPG NPSO



81 SPBE LPG PSO/NPSO SIAGA

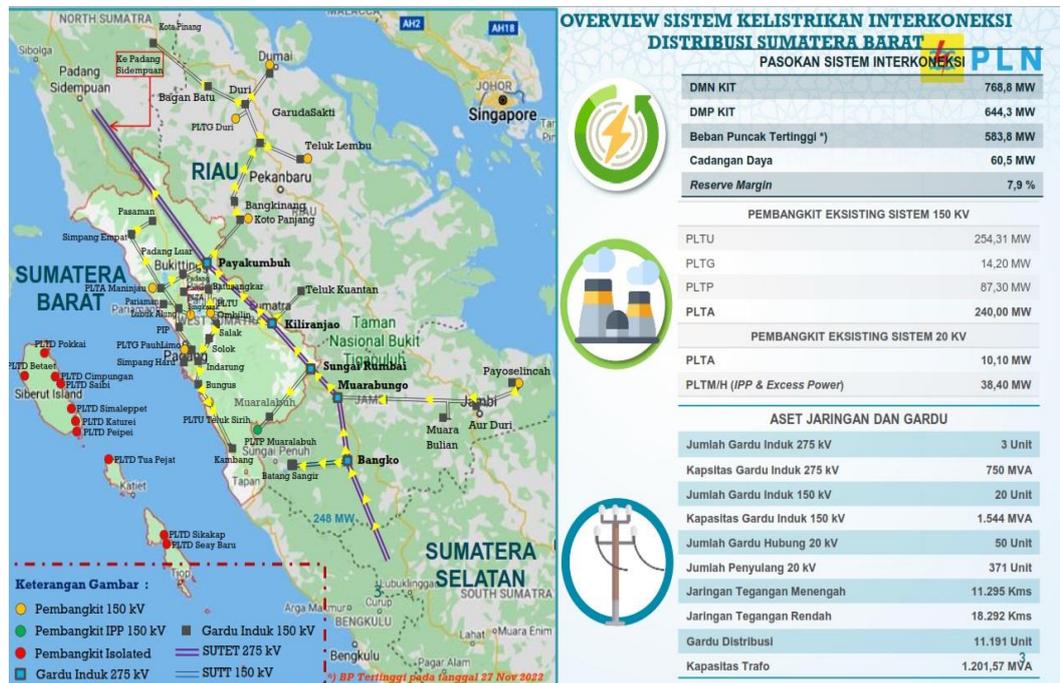
Memastikan pengisian LPG tidak terkendala di hari raya / libur



www.pertamina.com

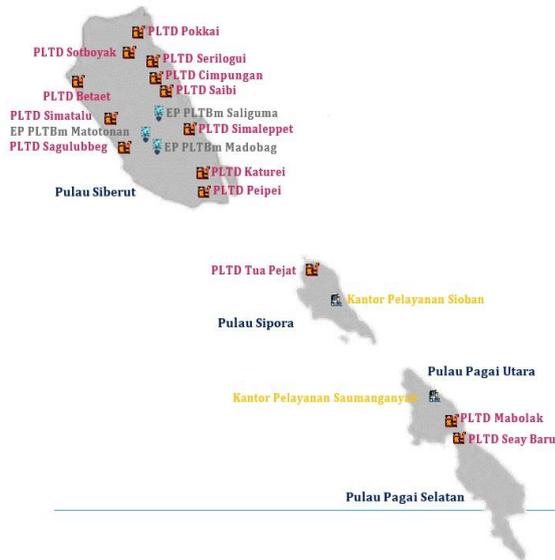


d. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)



Untuk menjawab tantangan akibat dampak pandemic Covid-19, PLN UID Sumatera Barat melakukan terobosan-terobosan sbb: (1) **Promo Produk Layanan (Promo Tambah Daya)**: Gebyar Kemerdekaan, Gebyar Ramadhan, Gebyar Lebaran; (2) **Electrifying Lifestyle**: Electrifying Marine, Electrifying Agriculture, Electric Vehicle Community, SPKLU-SPLU; (3) **Digitalisasi Layanan**: PLN Mobile, Yantek Optimization, Outage Management.

OVERVIEW SISTEM KELISTRIKAN ISOLATED DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



PASOKAN SISTEM ISOLATED

Beban Puncak	4,00 MW
DMN Pembangkit Isolated	8,90 MW
Cadangan Daya	4,90 MW
Reserve Margin	55,07 %



PEMBANGKIT ISOLATED EKSTING

PLTD (PLN)	8,80 MW
PLTBm (Perusda Kemakmuran Mentawai)	0,10 MW



ASET DISTRIBUSI

Jumlah PLTD	14 Unit
Jumlah PLTBm	3 Unit
Jaringan Tegangan Menengah	292,78 Kms
Jaringan Tegangan Rendah	236,95 Kms
Gardu Distribusi	117 Unit
Kapasitas Trafo	8,37 MVA



RE & RD PER-KABUPATEN SUMATERA BARAT

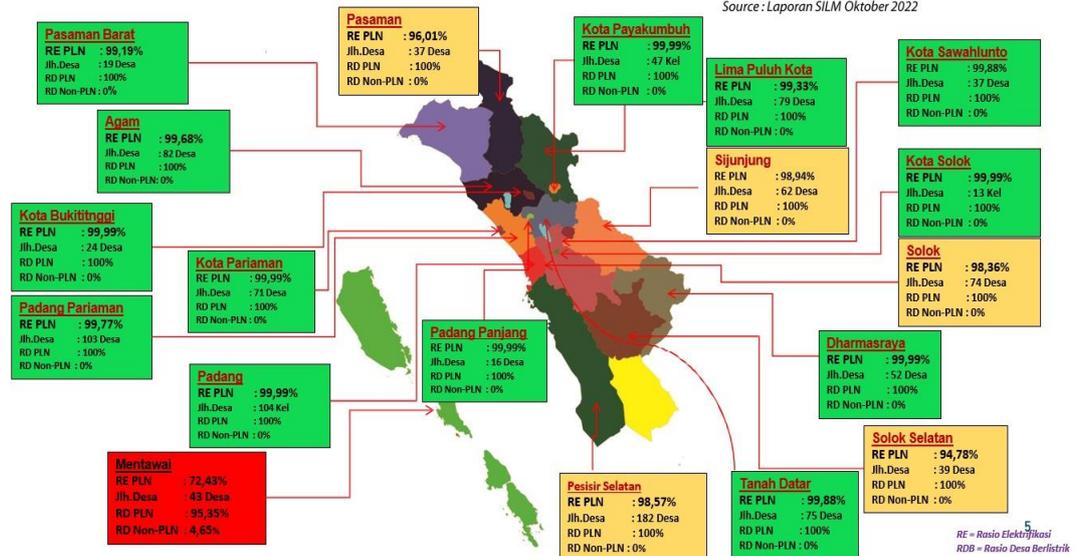
PROVINSI SUMBAR

- > 19 Kabupaten & Kota
- > 179 Kecamatan
- > 1.159 Desa/Nagari

Total RE & RDB SUMBAR

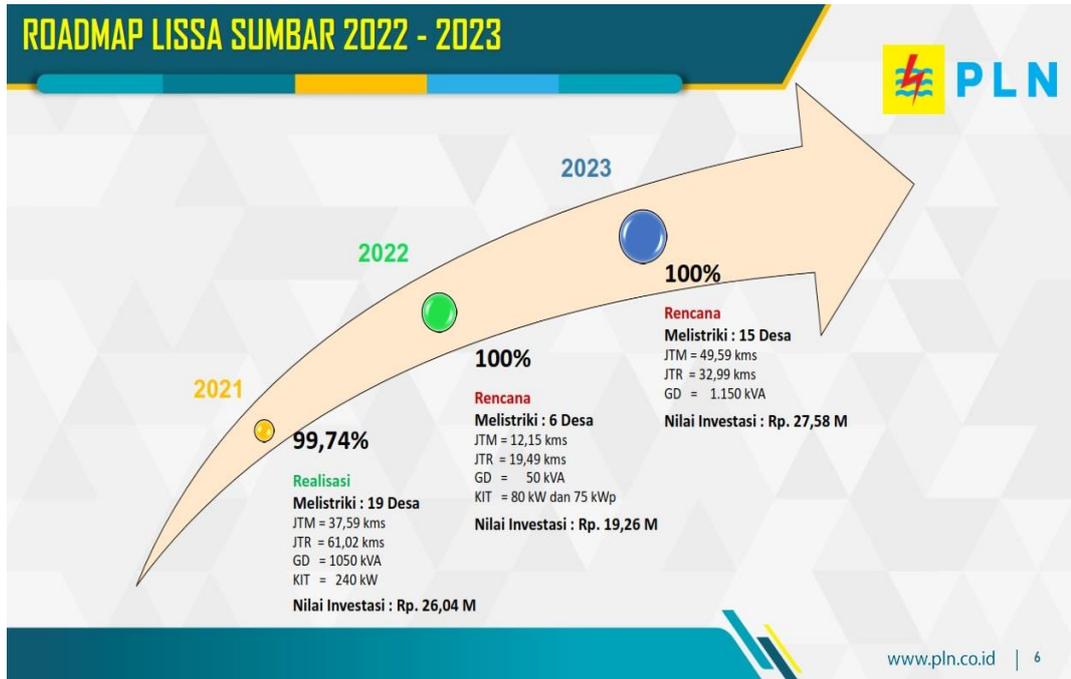
- > RE PLN = 98,79%
- > RE Total = 99,99%
- > RDB PLN = 99,74%
- > RDB TOTAL = 100%

Source : Laporan SILM Oktober 2022

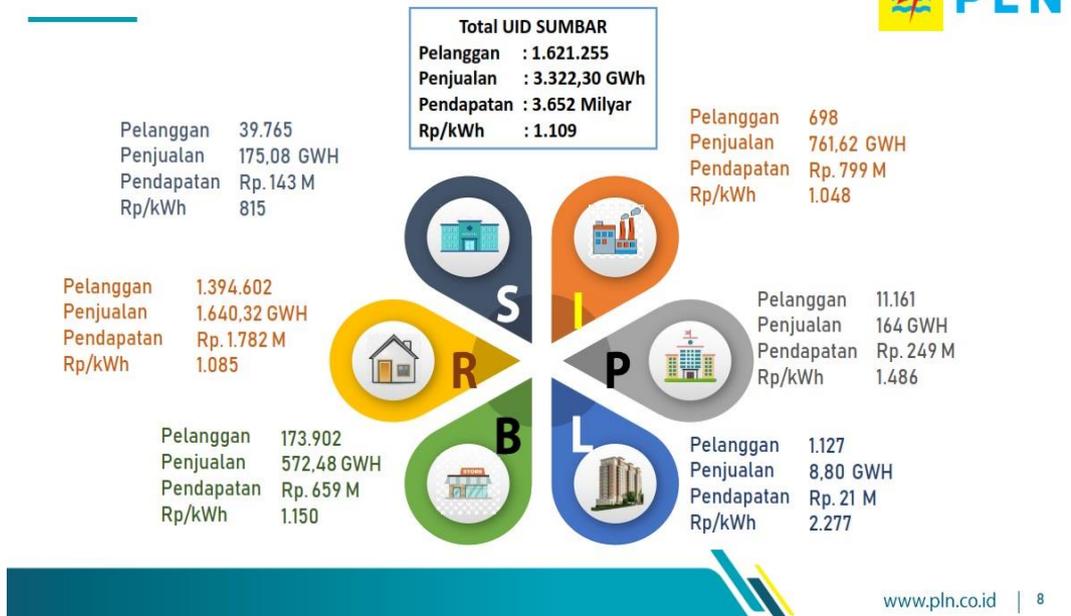


Pandemi Covid 2020 berpengaruh terhadap penjualan tenaga listrik UID Sumbar. Pengaruh stimulus untuk tarif R1 450 dan R1 900 Subsidi, merupakan salah satu faktor kenaikan growth tahun 2021. Penurunan I-4 dari awal tahun 2022 berpengaruh besar terhadap Growth bulanan yang dicapai. Mulai tahun 2022 pelanggan prabayar tarif R 450 VA dan R 900 VA

subsidi tidak lagi mendapatkan stimulus. Penjualan kedua golongan tarif tersebut mengalami penurunan.



PROFIL PENJUALAN UID SUMATERA BARAT



e. PT Pupuk Indonesia



REGULASI YANG MENGATUR SUBSIDI PUPUK TAHUN 2022



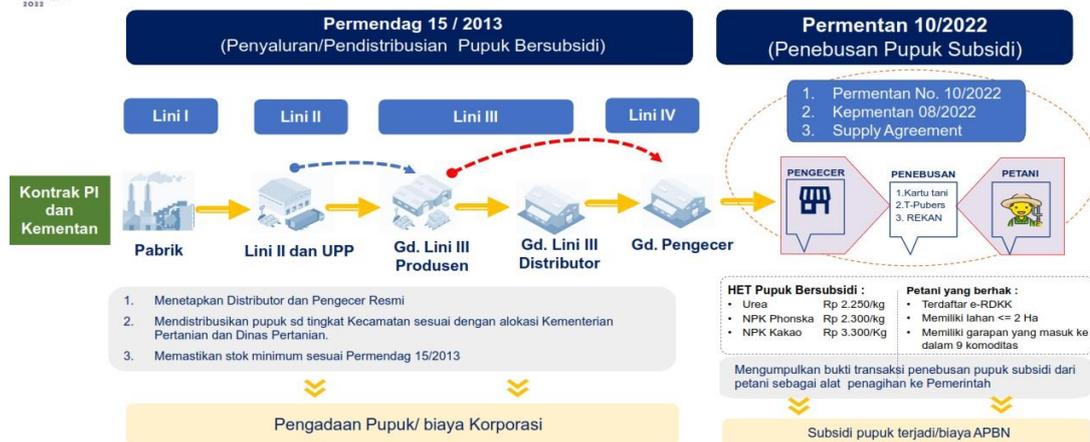
- **Permendag No. 15/M-DAG/PER/4/2013**
Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian
- **Permentan Nomor 28 Tahun 2020**
tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
- **Permentan Nomor 10 Tahun 2022**
Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
- **Keputusan Nomor 08/KPTS/R.C.210/B/12/2022**
tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022
- **SK Gubernur atau SK Kepala Dinas Provinsi**
tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 per Kab/Kota
- **SK Bupati/Walikota atau SK Kepala Dinas Kab/Kota**
tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 per Kecamatan
- **Supply Agreement Kementan dengan PI**
tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022



TATA KELOLA PUPUK BERSUBSIDI



DISTRIBUSI & PENEBUSAN PUPUK BERSUBSIDI



MEKANISME PENGAWASAN PUPUK BERSUBSIDI

Sesuai Permendag No. 15 Tahun 2013, Pasal 25, pelaksanaan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi :

NO	PIHAK	TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN
1	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Bertanggung jawab melaksanakan dan mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi di Lini I s.d Lini IV di seluruh wilayah Indonesia
2	Produsen	Bertanggung jawab melaksanakan dan mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi di Lini I s.d Lini IV di seluruh wilayah kerjanya
3	Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi di Tingkat Pusat (KEMANTAN)	Bertanggung jawab mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi di seluruh wilayah Indonesia
4	KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida) Propinsi	Bertanggung jawab mengawasi pupuk dari Lini I s.d Lini IV di wilayah kerjanya (Tingkat Provinsi)
5	KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida) Kabupaten/Kota	Bertanggung jawab mengawasi pupuk dari Lini I s.d Lini IV di wilayah kerjanya (Tingkat Kab/Kota)

PERUBAHAN KEBIJAN PUPUK BERSUBSIDI BERDASARKAN PERMENTAN 10/2022



Dari **70** Jenis Komoditas



Menjadi **9** Jenis Komoditas

Menjadi Padi, Jagung, Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Tebu Rakyat, Kakao Rakyat, Kopi Rakyat



HET PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2022

Ketentuan HET diatur dalam:

A. Pemendag no 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi:

Pasal 1 ayat 16:

"Harga Eceran Tertinggi selanjutnya HET adalah harga tertinggi Pupuk Bersubsidi dalam kemasan 50 kg, 40 kg, atau 20 kg di Lini IV yang dibeli secara tunai oleh kelompok tani dan/atau petani sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyanggarkan urusan pemerintah dibidang pertanian".

B. Permentan No. 10 tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian TA 2021 pasal 1 ayat 8 :

"Harga Eceran Tertinggi selanjutnya HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.

Tidak terpenuhinya HET pada umumnya diakibatkan:

1. Pembelian tidak dalam kemasan utuh,
2. Pembayaran tidak secara cash (pinjaman yamen),
3. Pupuk minta diantar ke lokasi tertentu

No	Jenis Pupuk	Penyediaan Pupuk		Rencana Penjualan Desember 2022			Cadangan
		Stok Awal Desember	Rencana Produksi Desember	Sisa Alokasi Subsidi (**)	Non Subsidi	Total	
0	1	2	3	4	5	6 = 4+5	7 = 2+3-6
1	Urea	568.538	684.337	508.321	153.187	661.507	591.368
2	NPK	379.625	324.123	324.167	33.555	357.722	346.026
3	ZA	92.413	-	-	18.000	18.000	74.413
4	SP-36	27.413	15.000	-	24.700	24.700	17.713
5	Organik	31.801	-	-	-	-	31.801
Total		1.099.790	1.023.459	832.487	229.442	1.061.929	1.061.321
Grand Total			2.123.250				

Keterangan :

- *) Rencana produksi merupakan produksi dikurangi penggunaan untuk bahan baku
- **) Sisa alokasi subsidi sesuai SK realokasi Kepmentan nomor 8 tahun 2022

**POSISI STOK PUPUK BERSUBSIDI
PERTANGGAL 14 DESEMBER 2022**

JENIS PUPUK	PRODUSEN			TOTAL	KETENTUAN STOK MINIMUM	% STOK MIN
	LINI I	LINI II	LINI III			
	1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6 = 3 : 5
UREA	340.994	117.368	332.682	791.044	225.652	147
NPK	61.483	37.760	231.720	330.963	164.559	141
TOTAL	402.476	155.129	564.402	1.122.007	390.211	145

Keterangan :

- Lini I Berada di Gudang Pabrik Produsen
- Lini II Berada di Gudang Penyangga Level Provinsi
- Lini III Berada di Gudang Penyangga Level Kabupaten/Kota

Stok pupuk bersubsidi per tanggal **14 Desember 2022** sebesar **1.122.007 Ton** atau mencapai **145%** apabila dibandingkan dengan ketentuan stok minimum yang ditentukan.

**STOK LINI III PUPUK BERSUBSIDI
PROVINSI SUMATERA BARAT
PER 14 NOVEMBER 2022**

PROPINSI	KABUPATEN/KOTA	UREA			NPK		
		STOK	KET. STOK	%	STOK	KET. STOK	%
SUMATERA BARAT	KAB. AGAM	1.093	456	239%	737	368	200%
SUMATERA BARAT	KAB. DHARMASRAYA	633	316	200%	820	244	335%
SUMATERA BARAT	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	4	3	131%	3	2	149%
SUMATERA BARAT	KAB. LIMA PULUH KOTA	684	341	200%	829	312	266%
SUMATERA BARAT	KAB. PADANG PARIAMAN	397	396	100%	1.814	381	476%
SUMATERA BARAT	KAB. PASAMAN	989	494	200%	682	341	200%
SUMATERA BARAT	KAB. PASAMAN BARAT	1.310	634	206%	1.805	453	398%
SUMATERA BARAT	KAB. PESISIR SELATAN	411	410	100%	702	380	184%
SUMATERA BARAT	KAB. SOLOK	820	370	221%	243	242	100%
SUMATERA BARAT	KAB. SOLOK SELATAN	404	201	200%	562	186	303%
SUMATERA BARAT	KAB. SIJUNJUNG	331	165	201%	175	174	101%
SUMATERA BARAT	KAB. TANAH DATAR	510	343	149%	801	290	277%
SUMATERA BARAT	KOTA BUKITTINGGI	15	7	214%	8	3	230%
SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	102	101	101%	68	67	101%
SUMATERA BARAT	KOTA PADANG PANJANG	14	7	215%	10	5	221%
SUMATERA BARAT	KOTA PARIAMAN	41	40	103%	56	27	204%
SUMATERA BARAT	KOTA PAYAKUMBUH	137	68	201%	93	46	202%
SUMATERA BARAT	KOTA SAWAHLUNTO	23	11	209%	29	18	166%
SUMATERA BARAT	KOTA SOLOK	44	22	205%	29	14	207%
SUMATERA BARAT		7.962	4.387	181%	9.467	3.553	266%

2. CATATAN DAN REKOMENDASI

Dari pertemuan yang dilakukan kepada seluruh mitra pada saat pelaksanaan kunjungan kerja reses ini, ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian mitra atau BUMN yang diundang dalam pertemuan. Catatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- Semen Padang harus mampu melakukan efisiensi serta dapat berkompetisi dengan semen-semen murah yang berasal dari china.
- Jangan sampai kejayaan Semen Padang tergerus dengan semen-semen dari china yang lebih murah seperti yang terjadi di Jawa Timur.
- Semen Indonesia harus memiliki Strategi fighting brand pada setiap anak usaha semen, seperti Semen Padang, Semen Tonasa, Semen Gresik, dll.
- Penurunan pasar Semen Padang khususnya di pulau Sumatera luar biasa. Untuk itu, strategi pemasaran PT Semen Padang agar segera dibenahi.
- Pabrik Indarung 1 milik PT Semen Padang dalam rangka menjadi Cagar Budaya sebisa mungkin menjadi alternatif wisata edukasi dan informasi di Sumatera Barat
- Apresiasi kepada PT Pertamina (Persero) atas penambahan kuota BBM Subsidi terhadap Provinsi Sumatera Barat, meskipun masih terus terjadi antrian BBM di sejumlah SPBU.
- PT Pertamina (Persero) harus berani membuat peraturan yang tegas dan aturan pembatasan terhadap penyelewengan dan penyalahgunaan terhadap distribusi BBM.
- Di Sumatera Barat, stok Pupuk cukup, namun jatah terhadap petani masih berkurang. Pemerintah harus mengatur regulasi terhadap distribusi pupuk bersubsidi ini.
- Apresiasi kepada PLN, karena Sudah 98 persen masyarakat di Sumatera Barat yang telah menikmati listrik. Tinggal yang di kepulauan Mentawai yang belum terjangkau. Untuk itu mohon dukungan dan bantuan dari PLN.
- Persoalan kelangkaan BBM khususnya jenis Solar ini menjadi penting. Mohon penjelasan, bantuan dan dukungan dari Pertamina. Seperti apa supply di lapangan? kenapa bisa terjadi antrian di SPBU, tidak hanya di Sumatera Barat saja, melainkan di daerah dan Provinsi lainnya juga terjadi.

Dari berbagai data dan informasi, serta catatan yang diperoleh pada saat pelaksanaan kunjungan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Komisi VI DPR RI, antara lain:

1. Komisi VI DPR RI mendukung Pabrik Indarung 1 PT Semen Padang menjadi kawasan Cagar Budaya dan wisata edukasi. Tentunya menjadi Cagar Budaya yang menarik. Selain edukatif, informatif dan juga experience, sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang berwisata.
2. Mengingat tantangan industri semen yang lebih berat ke depannya, untuk itu Komisi VI DPR meminta perlu adanya diskusi mendalam terkait bisnis semen nasional, mengingat perkembangan teknologi yang begitu pesat.
3. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN agar dapat menyiapkan laporan terkait basis data pupuk subsidi, listrik subsidi dan BBM subsidi.
4. Komisi VI DPR RI akan mengundang Direksi serta Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) dalam Rapat Dengar Pendapat di Masa Sidang yang akan datang dalam rangka membahas kelangkaan BBM jenis Solar yang mengakibatkan antrian di sejumlah SPBU belakangan ini.
5. Komisi VI DPR RI perlu menyampaikan berbagai catatan yang telah diperoleh selama kunjungan untuk disampaikan kepada Kementerian BUMN dan Perusahaan BUMN terkait agar dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

3. DOKUMENTASI KEGIATAN







4. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat pada masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh dalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VI DPR RI.

Padang, 21 Desember 2022
Ketua Tim Kunker Komisi VI DPR RI
Ke Provinsi Sumatera barat

Aria Bima

A – 189